

Pendidikan Islam Multikultural Pascakonflik di Luwu Utara

¹Abdul Muin Razmal, ²Muhammad Yaumi, ³Rusdiansyah

^{1,2}UIN Alauddin Makassar, ³IAIN Palopo

Email: Abdulmuinrazmal48@gmail.com, Muhammad.yaumi@uin-alauddin.ac.id,
rusdiansyah@iainpalopo.ac.id

Abstract

The results showed that the post-conflict Multicultural Islamic Education that took place in North Luwu seemed to emphasize religious moral values, such as compassion, love, help, respect for differences of opinion, respect for diversity of beliefs, and other attitudes that can create relationships. harmony between faith and culture. Multicultural education instilled in students is awareness of living in cultural diversity in society, respect for human rights, and efforts to minimize prejudice, especially interreligious prejudice that has been built up in North Luwu. All of these achievements are aimed at enlivening a harmonious society in terms of ethnic, religious and cultural diversity. In its implementation, the multicultural paradigm of religious education in North Luwu allows students to appreciate plurality and heterogeneity as well as the consequences of cultural, ethnic, sectarian and religious diversity which are the reality of the North Luwu community. The post-conflict Islamic education model in North Luwu consists of three models, namely through educational institutions both public schools and Islamic institutions, through mass and political organizations, and through Islamic organizations.

Keywords: Multicultural, Post-Conflict, Islamic Education

Abstrak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Islam Multikultural yang berlangsung di Luwu Utara pascakonflik selama ini tampak menekankan pada nilai-nilai moral agama, seperti kasih sayang, cinta, tolong menolong, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keragaman keyakinan, dan sikap-sikap lain yang mampu menciptakan hubungan harmonis antariman dan kebudayaan. Pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada peserta didik adalah kesadaran hidup dalam keragaman budaya di tengah masyarakat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta upaya meminimalkan prasangka, terlebih prasangka antaragama yang selama ini terbangun di Luwu Utara. Semua pencapaian ini ditujukan untuk menghidupkan suasana masyarakat yang harmonis dalam keragaman etnis, agama, dan budaya. Paradigma multikultural pada pendidikan agama di Luwu Utara dalam pelaksanaannya memungkinkan peserta didik menghargai pluralitas dan heterogenitas serta konsekuensi keragaman budaya, etnis, aliran, dan agama yang menjadi realitas masyarakat Luwu Utara. Model pendidikan Islam pascakonflik di Luwu Utara terdiri dari tiga model, yakni melalui lembaga pendidikan baik sekolah umum atau lembaga-lembaga Islam, melalui organisasi massa dan politik, dan melalui organisasi Islam.

Kata Kunci: Multikultural, Pascakonflik, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Sejarah peradaban manusia selalu diwarnai berbagai konflik kepentingan yang, tentu saja, menimbulkan korban¹. Pertentangan ideologi, agama, suku, dan bangsa telah menimbulkan korban jiwa dan harta, bahkan mengarah kepada penghancuran peradaban. Tidak bisa dipungkiri konflik yang terjadi seringkali dipicu oleh perbedaan doktrinal yang diyakini sebagai kebenaran absolut. Tentu saja, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik sering menjadi bagian yang menyertai konflik tersebut². Bahkan di beberapa kasus, konflik dengan motif etnik sering direkayasa menjadi konflik agama.

Konflik dengan alasan apapun akan selalu berdampak bukan hanya pada materi tetapi juga pada kehormatan dan jiwa, serta terhadap berbagai tatanan sosial, masyarakat, dan lembaga sosial, termasuk pendidikan. Beberapa penelitian terhadap kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan dampak dan pengaruh yang beragam. Konflik di Manado menunjukkan bahwa konflik di daerah tersebut sempat menimbulkan tekanan psikologis bagi sebagian umat Kristiani dan Islam³. Sebaliknya, konflik yang terjadi di Luwu Utara menunjukkan bahwa dampak konflik sosial terhadap implementasi pendidikan agama dan keagamaan di Luwu Utara khususnya Kecamatan Baebunta dan Sabbang Propinsi Sulawesi Selatan tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar saja, bahkan ataupun kegiatan keagamaan⁴.

Sementara itu konflik di Luwu Utara menunjukkan bahwa secara fisik dampak yang bernuansa agama yang terjadi di kota Baebunta pada tahun 1999 tampak jelas. Hal ini disebabkan oleh karena sasaran kerusuhan saat itu lebih kepada pemukiman penduduk dan sarana ibadah. Namun konflik tersebut berdampak terhadap proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan agama di semua jenjang pendidikan⁵. Kasus yang sama terjadi di kecamatan Sabbang, Baebunta, dan rongkong. Sikap ini menunjukkan adanya ketidaktenangan masyarakat⁶.

Bagi bangsa Indonesia yang multikultural, eksistensi pendidikan terutama pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam pembinaan masyarakat bangsa yang hidup rukun dalam ke-bhinneka-an. Sejak

¹ Konflik pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah konflik antara Qabil dan Habil yang berakhir pada pembunuhan anak manusia pertama. Lihat Q.S. *al-Ma'idah*/5: 27-32.

² Lihat Th. Sumartana, "*Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi tentang Hubungan Antar Agama di Indonesia*", dalam Th. Sumartana, et al., ed., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 79.

³ Lihat Badruzzaman, et al., eds., *Implementasi Pendidikan Agama di Daerah Pasca Konflik*, (Cet. I; Makassar: Cahaya Mujur Lestari, 2009), h. 97-99.

⁴ Kepala Wilayah Kecamatan Baebunta, Wawancara, di Baebunta, 27 Desember 2013

⁵ Kepala Wilayah Kecamatan Baebunta, Wawancara, di Baebunta, 27 Desember 2013

⁶ G. Kartasapoetra dan L.J.B. Kreiners, *Sosiologi Umum*, Cet. I; (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 143

awal pertumbuhan Islam, para pemikir Islam telah berusaha memahami konsep pendidikan Islam dengan menggunakan konsep filsafat jika kita merujuk pada pengertian filsafat⁷. Tetapi konflik yang terjadi di beberapa bagian wilayah Indonesia mengundang pertanyaan atas ketidakberdayaan pendidikan, termasuk pendidikan Islam dalam memberikan pencerahan dan menumbuhkan sikap saling menghargai keberagaman sebagai bangsa yang pluralistik.

Ada tiga argumentasi yang dilontarkan masyarakat Luwu menanggapi munculnya konflik horizontal antara masyarakat Desa Baebunta dan Desa Salassa. *Pertama*, konflik itu disebabkan kesenjangan ekonomi⁸. *Kedua*, ada konspirasi politik yang diduga mengirim provokator untuk mengacaukan keadaan. *Ketiga*, proses sosialisasi nilai-nilai agama dan budaya yang gagal. Argumentasi pertama merupakan generalisasi dari konflik-konflik sosial yang berkembang hampir merata di seluruh pelosok tanah air. Secara ekonomi, masyarakat Luwu Utara pada umumnya dan masyarakat Baebunta khususnya mempunyai tingkat sosial ekonomi yang hampir merata. Justeru itu muncul pendapat kedua yang mengaitkan dengan situasi politik nasional bahwa kemungkinan ada kelompok provokator. Tetapi argumentasi kedua ini juga masih perlu pembuktian. Sebagaimana argumentasi pertama dan kedua, argumentasi ketiga juga masih memerlukan penelitian untuk menemukan faktor konflik yang masih tersembunyi untuk mencari solusi pemecahannya. Namun dalam banyak kasus konflik sosial seringkali diawali dari perselisihan paham dan perkelahian pemuda desa, baik karena disengaja maupun tidak disengaja⁹.

Konflik yang terjadi di Luwu Utara berdampak kepada proses pendidikan. Proses belajar di sekolah tidak dapat dilaksanakan selama satu bulan. Setelah sebulan sekolah tutup, kegiatan proses belajar berlangsung kembali setelah diadakan upacara perdamaian di Istana Palopo tanggal 27 Oktober 1998. Namun demikian, sebagian besar peserta didik, terutama yang terlibat konflik tidak berani pergi sekolah. Beberapa peserta didik pendatang memutuskan pindah sekolah ke daerah lain. Sebagian kecil yang lain putus sekolah¹⁰.

⁷ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*. (Cet. VIII; Bandung; PT. al-Maarif, 1999), h.10

⁸ Pada saat terjadi konflik, Desa Baebunta dan Desa Salassa masih dalam wilayah pemerintahan kabupaten Luwu. Sekarang dengan pemekaran kabupaten Luwu menjadi Luwu dan Luwu Utara, Baebunta masuk wilayah pemerintahan kabupaten Luwu Utara. Lihat *Ibid.*, h. 4.

⁹ A. Aziz Tenrigau, dkk, *Baebunta dalam Kerajaan Luwu*, (Palopo, A. Djemma University Press, 2007), h. 17

¹⁰ Lihat Abdul Muin Razmal, "Konflik Sosial Antara Masyarakat Rongkong dan Baebunta di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara", h. 105-106.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena konflik yang terjadi di Luwu Utara, khususnya konflik antara penduduk Desa Salassa (etnik Rongkong) sabbang, umumnya beragama Kristen) dan Desa Baebunta (etnik Baebunta, umumnya beragama Islam) melibatkan dua etnik yang bukan hanya memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan sosial mereka selama ratusan tahun hampir tidak ada masalah. Mereka hidup berdampingan dalam prinsip: *Rebba sipatokkong, mali siparappe, sirui' menre., tessirui no', malilu sipakainge', mainge'pi mupaja*¹¹. Komunitas Rongkong, sabbang dan Baebunta hidup damai sepanjang sejarah kebesaran kerajaan Luwu dengan memegang teguh prinsip adat ini sehingga ketika terjadi konflik, dinilai oleh banyak kalangan sebagai fenomena luntarnya kesadaran sosial di kalangan kedua kelompok masyarakat tersebut.

Metode

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang ada dan tersedia dari banyak sumber, antara lain catatan hasil dari pengamatan di lapangan, hasil wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga analisis data, yaitu dimulai dengan reduksi data, disusul dengan display data, penarikan kesimpulan dan diakhiri dengan memverifikasi data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum¹².

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada¹³. Penelitian ini juga hendak mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan masalah yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini juga tidak menetapkan penelitiannya berdasarkan variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis¹⁵. Penelitian ini mengambil lokasi dan objek

¹¹ Lihat A. Muin MG, *Sirik na Pacce*, Cet. IV (Ujung Pandang: Yayasan Makassar Press, 1994), h. 46.

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. I, (Cet. ke-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 143.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet. VII; Jakarta: Rineke Cipta, 2005), h. 234

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 20.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet. V; Jakarta: Alfabeta, 2008), h. 285.

penelitian pada pendidikan multikultural pascakonflik antara Islam dan Kristen di Kabupaten Luwu Utara.

Kondisi Pendidikan Islam Pascakonflik Masyarakat

Trem pendidikan Islam secara leksikal berasal dari kata “didik” yang diberi prefiks

“pen” dan sufiks “an”, yang dimaknai sebagai proses, perbuatan, dan cara mendidik¹⁶. Dalam bahasa Arab, penentuan kata yang sepadan dengan pendidikan diperdebatkan oleh para ahli, ada yang konsisten dengan term tarbiyah, ada juga yang menggunakan term *ta’dib* atau *ta’lim*. Atiyah al-Abrasyi misalnya, menyepadankan kata *tarbiyah* (تربية) dengan pendidikan¹⁷. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad Hasan yang menafsirkan kata *rabbany* pada QS. Al-Isra“/17: 24 sebagai memelihara atau mendidik¹⁸.

Adapun pengertian term “Islam” sebagaimana yang lazim dipahami. Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul. Lebih lanjut Nasution menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah al-Qur“an dan hadis¹⁹. Dengan demikian pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang didasarkan atas ruh (spirit) dan ajaran Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur dasar yang berada dalam kesatuan. Sistem pendidikan Islam memiliki misi tertentu yang diorientasikan untuk mencapai tujuan.

Pendidikan multikultural dalam sejarah kemunculannya pertama kali hadir di wilayah Amerika yang berupaya menolak sistem pendidikan yang mengandung diskriminasi etnis yang kemudian mendapat perhatian serius dari pemerintah²⁰. Berdasarkan tujuan pendidikan multikultural, ia berupaya mengajak warga pendidikan untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang alamiah (*sunnatullah*). Selain itu, pendidikan multikultural juga menanamkan kesadaran kepada peserta didik akan kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), kemajemukan (*plurality*), kebangsaan, suku, bahasa, tradisi, penghormatan agama, menghendaki

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 232

¹⁷ Aiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah al-Islamiah wa Falsifatuh*, (Cet. III, Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, t.th.), h. 22.

¹⁸ Hassan Muhammad Hassan dan Naiyah Jamaluddin, *Madaris al-Tarbiyah fi al-Daurah al-Islamiah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1984), h. 198-199

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1985), h.19.

²⁰ Nizar Ali (Eds), *Antologi Pendidikan Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2010), h.

terbentuknya tatanan kehidupan yang seimbang dan tidak menghendaki terjadinya proses diskriminasi kemanusiaan (*humanity*), dan nilai-nilai demokrasi (*democraton valves*) yang diperlukan di sekolah yang semacam ini akan mampu membendung pemikiran yang radikal.

Pendidikan Islam multikultural dapat diartikan sebagai sistem pengajaran yang lebih memusatkan perhatian kepada dogma-dogma syariat Islam dalam hal toleransi, menghargai kepercayaan dan budaya orang lain. Bahkan pendidikan Islam multikultural juga dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang memiliki prinsip keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kedamaian, dan mengedepankan asas-asas demokrasi yang ada.

Budaya konflik (kekerasan) sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural ini. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan atau perkelahian massal. Di mana-mana ada tawuran, antara orang-orang biasa di desa-desa hingga antarwarga kampung di tengah-tengah kota metropolitan seperti Jakarta. Kalau yang terlibat adalah orang dari suku atau agama berbeda, bisa terjadi perang suku atau perang agama. Ada empat faktor yang membuat masyarakat bertindak dengan kekerasan. Pertama, transformasi dalam masyarakat, Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat, dan Ketiga, masyarakat yang sakit.

Pendidikan agama yang berlangsung di Luwu Utara selama ini tampak menekankan pada nilai-nilai moral agama, seperti kasih sayang, cinta, tolong menolong, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keragaman keyakinan, dan sikap-sikap lain yang mampu menciptakan hubungan harmonis antariman dan kebudayaan²¹. Para juga guru sangat menyadari suasana pascakonflik agama Luwu Utara. Pendidikan agama yang mereka ajarkan diupayakan berimbang pada kesalehan sosial peserta didik. Mereka (guru pendidikan agama) tidak memungkin bahwa konflik Luwu Utara meledak sebagai akibat dari gagalnya pendidikan agama yang mampu membangun kesadaran hidup dalam keberagaman²².

Berkaitan dengan pascakonflik Luwu Utara, guru memandang peristiwa tersebut cukup sebagai bahan perbandingan saja. Karenanya, tidak perlu ada materi khusus yang meyakinkan peserta didik tentang kenyataan bahwa konflik itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi, masalah kerukunan beragama hanya disampaikan dengan contoh-contoh saja.

Berkaitan dengan materi mengenai pengenalan kelompok lain sebagai the others (yang lain), sebagai contoh. kurikulum yang digunakan guru dalam

²¹ Muhammad Alwi M, Kasi Pendis Kementerian Agama Kabupaten Luwu, *Wawancara*, di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, 25 Desember 2013

²² Mukhlis Chalid, *Kepala Kementerian Agama, wawancara*, Baebunta, 17 Desember 2013.

pembelajaran pendidikan agama Kristen adalah GPM, namun ia tetap mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh PGI. Dengan adanya peserta didik Kristen dari aliran lain seperti Advent, Gemit, Pantekosta, maka guru agama Kristen membuat penyesuaian sehingga tidak terpaku pada satu aliran. Hal ini diyakini oleh para guru agama Kristen sebagai sebuah bentuk kesalahpahaman memahami dogma saja sehingga tidak perlu dipermasalahakan. Guru pendidikan agama Kristen juga sedikit mengajarkan materi agama Islam kepada peserta didiknya. Hal ini dilakukannya tanpa harus ada penekanan pada yang benar dan yang salah, namun kepada peserta didik ditegaskan untuk harus percaya bahwa semua agama mengajarkan kebenaran.

Berpijak pada argumentasi di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya di dalam pendidikan Islam multikultural, pendidikan yang berlangsung tidak hanya menekankan pada *how to know* (bagaimana mengetahui), *how to do* (bagaimana melakukan), *how to be* (bagaimana menjadi), namun juga menekankan akan pentingnya *how to live and work together with others* (bagaimana hidup dan bekerja sama dengan yang lain). Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama di Luwu Utara belum menampilkan keterampilan hidup bersama yang dalam praktiknya meliputi pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang merupakan prasyarat esensial bagi keberhasilan hidup dalam keragaman beragama. Pembelajaran agama belum mampu mengklarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama dan pendewasaan emosional. Hal ini sangat berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada peserta didik bahwa kebersamaan dalam keragaman bukanlah suatu hal yang mudah²³.

Dalam pendidikan Islam yang diajarkan, agama hanya dilihat sebagai prosedural ritual semata. Agama tidak ditransformasikan di ruang publik, tapi hanya di ruang-ruang privat ritual. Sebagai akibatnya, ketika ada perbedaan-perbedaan agama, tidak mampu mengelola perbedaan yang ada. Guru agama harus mendorong agar pembelajaran agama menjadi pusat pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, bukan mengkompromikan teologi, namun mendorong untuk menghargai orang lain yang mempunyai pandangan berbeda. Pelajaran agama seharusnya mendorong peserta didik untuk menempatkan perbedaan agama dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan agama berwawasan multikultural dalam pelaksanaannya akan menutup segala kemungkinan diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan perbedaan etnis, agama, budaya, dan lainnya. Sebagai contoh dalam hal rekrutmen peserta didik baru. Data lapangan menunjukkan bahwa sebelum terjadinya konflik agama Luwu Utara. Jumlah peserta didik

²³ Ibrahim Nasir, Kepala Sekolah SMA 1 Baebunta, wawancara, Sabbang, 16 Desember 2013

muslim yang bersekolah yang dikelola yayasan Kristen yang jumlahnya cukup banyak, lebih dari 73 peserta didik. Di dalam lingkungan sekolah Kristen tidak ada perlakuan yang berbeda mengenai peserta didik muslim tidak diwajibkan mengikuti pelajaran agama Kristen, namun jika mereka ingin mengikuti pelajaran sebagai sebuah pengetahuan atau sekadar ingin tahu mereka dipersilahkan mengikuti.

Pelaksanaan pendidikan Islam multikultural sebagai pendidikan agama alternatif yang dilaksanakan di Luwu Utara bertujuan agar pendidikan agama yang ada benar-benar menjadi wahana bagi peserta didik untuk menyadari keragaman yang ada di sekitarnya. Pendidikan agama multikultural juga menghendaki pendidikan agama di Luwu Utara benar-benar memancarkan sinar pencerahan bagi peserta didik, sehingga agama yang diajarkan di sekolah di Luwu Utara benar-benar menjadi spirit perdamaian bagi masyarakat Luwu Utara ke depan.

Peran Pendidikan Islam yang Berwawasan Multikultural Pascakonflik di Kabupaten Luwu Utara

Pendidikan Islam yang multikultural dalam lingkup Luwu Utara dipandang dapat mempersiapkan peserta didik dengan eksplorasi agamanya guna berperan aktif sebagai warga negara dalam masyarakat yang secara agama, etnik, dan budaya berbeda. Dalam pendidikan multikultural, memungkinkan diberikan pengetahuan tentang agama lain dalam praktik pembelajaran pendidikan agama di sekolah secara seimbang, menjadi sebuah keniscayaan. Kondisi demikian akan membangkitkan kesadaran dan pemahaman multikultural dalam pendidikan agama di Luwu Utara, dan diharapkan peserta didik memperoleh kemampuan untuk menfungsikan dirinya secara efektif dalam situasi lintas budaya, lintas agama, dan lainnya²⁴.

Berkaitan dengan pandangan-pandangan di atas, maka pendidikan Islam multikultural menjadi kebutuhan mendesak, agar pendidik bersama orang tua atau keluarga, tempat-tempat ibadah, dan pemerintah dapat memelihara peserta didik sebagai generasi masa depan yang toleran dan humanis. Berpijak pada alasan pembentukan pribadi peserta didik yang multikultural dalam keberagamaannya, maka dalam pendidikan agama multikultural, peran pendidik di sekolah diharapkan menjadi sumber daya yang *well informed* (penginformasi yang baik) mengenai berbagai isu yang luas berkaitan dengan keragaman agama, etnis, dan agama di Luwu Utara. Pendidik dalam hal ini dipandang berperan sentral sebagai *the man behind the gun* (orang yang berdiri di belakang senjata) yang secara filosofis diandalkan untuk menggali kebijaksanaan-kebijaksanaan potensial tentang hidup bersama yang masih

²⁴ Indah, Bupati Luwu Utara, *Wawancara* di Masamba, 24 Mei 2014

terpendam dan menggali kembali harmoni yang telah hilang akibat konflik di kabupaten Luwu Utara.

Peran pendidikan Islam sangat penting dan berpengaruh di sekolah. Ketika pendidik masuk, berada, dan berbicara di muka kelas, pendidik otomatis akan membawa sifat, kepribadian, agama, perilaku, pemikiran, sikap, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, maka keseluruhan dan penampilan, cara berpakaian, emosi, memperlakukan orang lain, ideologi, dan paham yang dianut pendidik akan terbawa tanpa sengaja ketika berhadapan dengan anak didiknya²⁵.

Peran pendidikan Islam multikultural sebagaimana diterangkan di atas akan terpola seiring dengan kondisi sosial yang melingkarinya. Gambaran kondisi sosial yang berkembang di masyarakat luas dan Luwu Utara dewasa ini membuat sebagian besar orang merasa terkejut dengan pluralitas ideologi, agama, dan kultur yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, manusia kemudian dituntut mengambil sikap terhadap ideologi, agama, dan kultur yang lain. Begitu pula halnya dengan pendidik, walaupun sifatnya lebih personal, akan tetapi kenyataannya mau tidak mau, suka atau tidak suka, juga dituntut untuk memberikan respons terhadap pluralitas itu, baik berupa penolakan, sikap masa bodoh, menerima begitu saja, bahkan sikap-sikap kritis dan terbuka yang nantinya sengaja atau tidak, muncul dalam proses pendidikan²⁶.

Tawaran pendidikan Islam multikultural dalam kemajemukan Luwu Utara adalah suatu yang realistis, mengingat bahwa kemajemukan di satu sisi memberikan dampak positif, tetapi di sisi lain tidak jarang berdampak negatif. Sebab, faktor kemajemukan tersebut sering kali menimbulkan konflik antarkelompok masyarakat. Konflik tersebut pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan, sosial, ekonomi, dan ketidakharmonisan masyarakat. Begitu halnya dengan yang terjadi di Luwu Utara, kemajemukan di sini juga merupakan realitas yang tidak dapat dimungkiri. Namun, akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa jika kenyataan multikultural Luwu Utara dikelola dengan baik dan sistemik²⁷.

Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. *al-Hujurat* /49:13 dan Q.S. *ar-Rum* /30:22. Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa Allah telah menciptakan kemajemukan umat manusia, walaupun sejatinya Allah mampu menciptakan satu jenis umat saja. Di samping itu, penciptaan ini dimaksudkan Allah agar umat manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini karena di sisi Allah, nilai atau kualitas manusia tidak ditentukan oleh etnis, warna kulit, dan lainnya, tetapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah.

²⁵ Indah, Bupati Luwu Utara, *Wawancara* di Masamba, 24 Mei 2014

²⁶ Indah, Bupati Luwu Utara, *Wawancara* di Masamba, 24 Mei 2014

²⁷ Q.S. *al-Hajj* /22: 34 dan Q.S. *asy-Syu'ara*/26 : 67

Selain itu, Islam juga menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah/ 2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui²⁸.

Dengan prinsip ini telah tegas bahwa Islam mengajak untuk mencari akar persamaan yang menjadi dasar dari ajaran agama masing-masing, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan sebagai pusat semua ajaran agama dan bukan pada sebutan nama Tuhan yang secara kultural, masing-masing agama pasti berbeda.

Dalam konteks keberagaman yang majemuk di Indonesia ini, umat Islam harus dikembangkan sebagai bagian dari proses pengayaan spiritual dan penguatan moralitas universal. Dengan demikian, tanpa adanya kesediaan umat Islam untuk menerima pluralitas keagamaan, ini akan menciptakan konflik, baik internal maupun eksternal. Keadaan ini akan menjurus pada tindakan kekerasan yang sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan utama kehadiran Islam di bumi sebagai rahmatan li al-'alamln.

Model Pendidikan Islam Pascakonflik

Ada empat model pendidikan Islam Pascakonflik di Luwu Utara, antra lain yaitu:

1. Melalui gerakan Dakwah Salaf

Pascakonflik, simpati masyarakat terhadap Salafi ternyata tidak bertahan lama. Doktrin-doktrin mereka yang keras, seperti penilaian bid'ah terhadap praktik keagamaan masyarakat yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat Luwu Utara pada umumnya dan masyarakat Baebunta dan sabbang pada khususnya, seperti tahlilan, peringatan hari-hari kematian. dan talqin di atas kuburan; serangan mereka terhadap kelompok-kelompok Islam lain, dan klaim mereka sebagai firqah najiyah, sikap mereka yang tertutup. mau menang sendiri dan tidak kompromistis, lambat laun mengikis rasa simpati itu. Terlebih setelah konflik Luwu Utara sudah mulai mereda dan kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran mereka tidak seperti di awal-awal konflik.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

Akhir tahun 2007, Laskar Jihad dibubarkan. Pasca pembubaran Laskar jihad, para anggotanya bukannya kembali ke daerah asalnya melainkan mereka tetap tinggal di Baebunta. Sebagian besar mantan anggota Laskar yang tinggal tersebut, memilih menetap di Baebunta dan Sabbang dengan berbagai alasan, ada yang karena sudah menikah dengan orang setempat, ada yang bekerja seperti membuka bengkel, pelayan toko, berdagang gorengan, dan sebagainya²⁹. Para ustaz yang masih tinggal, kemudian mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama yayasan (Pesantren) yang mengelolanya, ini menjadi sentral kegiatan Salafi di Luwu Utara, bagi mereka secara struktur tidak ada organisasi, seperti pengakuan mereka sendiri, tidak ada hubungan koordinasi, baik di antara mereka sendiri, maupun antara mereka dengan Salafi di luar Luwu Utara, seperti halnya dalam sebuah organisasi.

Daftar ustaz Salafi di seluruh Indonesia yang direkomendasikan di dalam milisi Salafi pada tahun 2005 sejumlah 24 orang, empat orang di antaranya mukim di Masamba, yaitu Ustaz Alimuddin (pengelola SDIP), ustaz H.Mappa, ustaz Awaluddin dan ustaz Sholihan. Ini menunjukkan pentingnya posisi Baebunta dalam Salafi. Hanya sedikit ustaz Salafi yang merupakan orang Asli Luwu Utara, salah satunya adalah ustaz Untung Sunardi, yang masih berusia 39 tahun, tapi wawasannya tentang paham Salafi sangat bagus³⁰.

Saat ini Salafi di Luwu Utara kurang mendapat simpati dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka tidak lagi dapat menarik hati masyarakat seperti ketika pertama kali datang di Luwu Utara. Hal ini selain karena faktor internal dari paham Salafi itu sendiri, juga karena faktor eksternal dari Masyarakat Luwu Utara, yang sampai saat ini masih sangat kuat memegang adat.

2. Gerakan Dakwah Jamaah Tablig

Bagi jamaah tablig, setiap orang harus menjadi mubalig. Mereka bisa menyebut kegiatan tablig mereka sebagai “usaha dakwah”. Setiap orang harus menyisipkan waktu untuk terlibat dalam usaha ini. Dalam praktiknya, setiap anggota jamaah harus menyiapkan waktunya sebanyak, 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam seumur hidup untuk mendakwakan agama Allah. Praktik dakwah semacam itu disebut “khuruj” (keluar). Khuruj dilakukan di mesjid-mesjid. Bukan hanya di daerah sekitar tempat tinggal mereka, tetapi sampai ke luar daerah juga mereka lakukan. ketika melakukan khuruj, ada praktik jaulah, yaitu berjalan kaki keliling ke rumah-rumah di sekitar mesjid tempat khuruj untuk mengajak orang datang ke mesjid untuk shalat berjamaah. Ceramah agama (bisa disebut bayan) di sampaikan ustaz tiap sehabis shalat

²⁹ Mustofa Kamal, dan beberapa yang PNS di Baebunta, *Wawancara*, di Baebunta, 28 Agustus 2013

³⁰ H. Untung Sunardi, Pengawas Pendidikan Islam, *Wawancara*, Masamba, 29 Agustus 2013

wajib dimana sang ustaz berada di depan dan ia dikelilingi oleh jamaahnya yang bergerombol dan rapat antara satu dengan lainnya, sehingga tidak ada tempat yang lowong sedikit pun. Bagi mereka, seperti itulah praktik dakwah yang dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya dahulu.

Menurut H. Pahri, sumber-sumber materi dakwah yang paling banyak dirujuk adalah buku-buku kitab klasik seperti *al-Umm, Ihya' Ulum ad-Din* serta buku Fadilah 'Amal karangan Syekh Muhammad Zakariah Al-Handalawi dari India³¹. Buku tersebut banyak memberikan motivasi dalam beribadah. Selain ketiga kitab tersebut, juga kitab *Hayat as-Sahabah* karangan Maulana Yusuf Al-Handalawi. Kitab-kitab tersebut dipelajari dan didakwahkan dengan cara dibacakan. Salah seorang anggota yang tampil membacakan kitab tersebut dan jamaah mendengar dan menyimaknya. Selain itu kitab-kitab tersebut dijadikan bacaan harian (keharusan untuk dibaca setiap hari).³³

Pada gerakan Jamaah Tablig, tampaknya tidak dikenal istilah anggota sebagai layaknya dalam sebuah organisasi. Pengajian diadakan selalu terbuka, tidak tampak ada pemisahan antara yang anggota atau non-anggota. Hanya saja, mereka yang secara tidak langsung diakui keikhlasannya dalam ikut “berjuang demi agama” adalah mereka yang telah mengikuti *Khuruj*, walau hanya tiga hari. Dengan kata lain, hanya mereka yang pernah *Khuruj, -lah*, yang dianggap sebagai anggota.

3. Gerakan Pendidikan MT

Gerakan ini mendapat dukungan yang cukup besar di kalangan mahasiswa dan membentuk organisasi sendiri yang bernama Lembaga Dakwah Kampus (LDK) al-Izzah. Bahkan secara nasional gerakan ini mendapatkan tempat di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Dalam organisasi kampus mereka berafiliasi dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Hampir seluruh kepengurusan KAMMI berasal dari aktivis harakah Tarbiyah. Sedangkan pada partai politik mereka berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtarah (PKS). Tokoh-tokoh yang aktif PKS adalah mereka yang juga sering terlibat aktif dalam jaringan dakwah kampus gerakan Tarbiyah. Kelompok keagamaan yang dewasa ini menikmati pengaruh luas di kalangan mahasiswa adalah suatu gerakan yang lazim disebut sebagai gerakan Tarbiyah³².

Pada interaksi kesehariannya, kelompok Tarbiyah cukup mudah dikenali, mereka menggunakan sapaan di antara sesama aktivis pengajian dengan istilah Arab: *ana* (saya), *antum* (kamu), *akhi* (saudara), *ukhti* (saudari).

³¹H.Pahri, tokoh JT Luwu Utara, *Wawancara*, di Masamba, 15 Oktober 2013

³²Pelabelan nama Tarbiyah ini didasarkan pada pola pembinaan yang mereka kembangkan, yakni dengan sistem *halaqah* yang dipandu oleh seorang ustaz atau dalam bahasa mereka seorang *murabbi* (pendidik) dengan jumlah anggota yang terbatas antara 10-15 orang, para anggota ini lazim disebut *murabbi*. ³⁵Muh. Amin, Kepala Kecamatan Baebunta, *Wawancara*, 27 Agustus 2014.

Sapaan ini sangat akrab dan familiar didengar di masjid, mushallah, di sekretariat. Ketika bertemu antar ikhwan, mereka bersalaman disertai rangkulan (laki-laki sesama laki-laki dan perempuan antar perempuan).

Mereka menerapkan makna hijab secara ketat, untuk yang *ukhwat* berjilbab lebar dan berpakaian jubah dalam bentuk terusan warna gelap lengkap dengan kaus kaki seperti lazimnya pakaian Muslimah di daerah Timur Tengah. Sementara yang ikhwan tampil dengan pakaian sederhana, kebanyakan menggunakan baju koko dan berjenggot.

Otoritas seorang *murabbi* (pimpinan kelompok) terhadap kelompok dan anggota yang dipimpinya sangat besar. Seorang *murabbi* sangat dipercaya untuk mencairkan jodoh atau bahkan pekerjaan yang cocok bagi anggotanya. Seorang *murabbi* juga sangat menentukan corak pemikiran dan sikap masing-masing kelompok yang dipimpinya, sehingga terdapat spektrum yang agak luas di antara kelompok-kelompok tersebut, mulai dari yang moderat hingga kelompok yang mengalami proses radikalisisasi.

4. Pendidikan Damai

Pendidikan damai merupakan proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan konflik dengan cara kreatif, dan bukan dengan cara kekerasan. Dalam konteks ini, pendidikan damai menjadi sangat terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat. Kesulitannya adalah tatkala cara kreatif yang ditempuh tidak menjadikan masyarakat puas dalam penyelesaian konflik. Memang, cara kreatif kadang kala dipandang tidak menampakkan kejantanan, rasa jagoan, dan semangat heroisme, yang kemudian mendorong penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan.

Keberhasilan pendidikan damai ditunjukkan oleh angka-angka, melainkan mengacu pada kualitas kompetensi untuk merespon kesulitan hidup yang dihadapi bersama. Pendidikan damai memadukan beragam tradisi pedagogi dan teori-teori pendidikan secara bersamaan, sambil mengembangkan inisiatif untuk memajukan manusia melalui proses belajar. Pendidikan damai dilakukan secara dinamis interdisipliner dan multikultural.

Dalam pendidikan damai, kondisi damai dipahami tidak sekadar sebagai tiadanya bentuk-bentuk kondisi damai kekerasan langsung, melainkan juga terwujudnya kondisi damai yang positif, Pendidikan damai dengan demikian mencakup seluruh aspek dalam perdamaian. Pendidikan damai diarahkan untuk menumbuhkan tiga aspek utama pengetahuan (*knowledge*) sebagai kognotive domain, keterampilan (*skill*) sebagai *psychomotoric* domain, dan sikap (*attitude*) atau *affective* domain untuk mengembangkan budaya damai secara global. Penjabaran tentang materi dan metode dalam pendidikan damai adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan damai memuat materi pengetahuan (*knowledge*) yang meliputi mawas diri, pengakuan tentang prasangka, berbagai isu lainnya seperti konflik dan perang, damai dan tanpa

kekerasan, lingkungan dan ekologi, nuklir dan senjata lainnya, keadilan dan kekuasaan, teori resolusi, pencegahan dan analisa konflik, budaya, ras, jender, agama, isu HAM, sikap tanggung jawab, pengaruh globalisasi, masalah buruh, kemiskinan dan ekonomi internasional, hukum internasional dan mahkamah keadilan, PBB, instrument, standar, dan sistem internasional, perawatan kesehatan, masalah AIDS, dan jual beli obat terlarang. Kedua, muatan materi keterampilan (*skill*) dalam pendidikan damai meliputi komunikasi, kegiatan reflektif dan pendengaran aktif, kerja sama, empati dan rasa halus, berpikir kritis dan kemampuan *problem solving*, apresiasi nilai artistik dan estetika, kemampuan menengahi sengketa, negosiasi, dan resolusi konflik, sikap sabar dan pengendalian diri, menjadi warga yang bertanggung jawab, penuh imajinasi, kepemimpinan ideal, dan memiliki visi. Ketiga, muatan materi nilai atau sikap (*attitude*) dalam pendidikan damai meliputi kesadaran ekologi, penghormatan diri, sikap toleransi, menghargai martabat manusia beserta perbedaannya, saling memahami antarbudaya, sensitif jender, sikap peduli dan empati, sikap rekonsiliasi dan tanpa kekerasan, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan resolusi berwawasan global³³.

Di ruang kelas, pendidikan damai diarahkan untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan anak melalui metode belajar partisipatoris dan kooperatif, serta suasana saling toleransi, peduli, dan menghargai. Melalui kegiatan dialog dan eksplorasi, guru bersama murid melakukan petualangan belajar kreatif. Para peserta didik ditumbuhkan dan diberdayakan untuk mampu berperilaku yang bertanggung jawab atas perkembangan diri dan prestasi mereka sendiri, sedangkan para guru memelihara kedamaian seluruh peserta didik.

Untuk itu, melihat konflik Luwu Utara dalam perspektif agama serta multikulturalisme yang telah mengakar di Baebunta, harus dijadikan sebagai titik tolak dalam mengelola keragaman masyarakat Baebunta secara rasional. Keberadaan pendidikan agama masih dipercaya sebagai salah satu pilar penting yang efektif untuk membangun kembali keharmonisan masyarakat Baebunta dan sabbang. Untuk itu, berdasarkan pelaksanaan dan hasil yang dicapai pendidikan agama yang diuraikan pada bab sebelumnya serta pendidikan agama, maka pada pembahasan ini dikemukakan model pendekatan pendidikan agama alternatif pascakonflik Baebunta dan sabbang, yaitu pendidikan agama multikulturalisme berbasis konseling budaya.

Simpulan

Pendidikan Islam yang berlangsung di Luwu Utara pascakonflik selama ini tampak menekankan pada nilai-nilai moral agama, seperti kasih sayang, cinta, tolong menolong, menghargai perbedaan pendapat, menghargai

³³ Kahar Rumma, Guru, Sabbang, *Wawancara*, 22 Agustus 2013

keragaman keyakinan, dan sikap-sikap lain yang mampu menciptakan hubungan harmonis antariman dan kebudayaan. Pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada peserta didik adalah kesadaran hidup dalam keragaman budaya di tengah masyarakat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta upaya meminimalkan prasangka, terlebih prasangka antaragama yang selama ini terbangun di Luwu Utara. Semua pencapaian ini ditujukan untuk menghidupkan suasana masyarakat yang harmonis dalam keragaman etnis, agama, dan budaya. Paradigma multikultural pada pendidikan agama di Luwu Utara dalam pelaksanaannya memungkinkan peserta didik menghargai pluralitas dan heterogenitas serta konsekuensi keragaman budaya, etnis, aliran, dan agama yang menjadi realitas masyarakat Luwu Utara. Model pendidikan Islam pascakonflik di Luwu Utara terdiri dari tiga model, yakni melalui lembaga pendidikan baik sekolah umum atau lembaga Islam, melalui organisasi massa dan politik, dan melalui organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Jamaah Tablig dan majelis taklim. Pada bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- A. Muin MG, Sirik na Pacce, Cet. IV (Ujung Pandang: Yayasan Makassar Press, 1994).
- Abrasyi, Aiyah al-. Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsifatuh, (Cet. III, Mesir: Isa al-Baby alHalaby, t.th.)
- Ali, Nizar (Eds), Antologi Pendidikan Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2010)
- Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian, (Cet. VII; Jakarta: Rineke Cipta, 2005)
- Badruzzaman, et al., eds., Implementasi Pendidikan Agama di Daerah Pasca Konflik, (Cet. I; Makassar: Cahaya Mujur Lestari, 2009)
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Ed. I, (Cet. ke-4; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Faisal, Sanapiah. Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
- Hassan, Muhammad Hassan dan Naiyah Jamaluddin, Madaris al-Tarbiyah fi al-Daurah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1984)

- Kartasapoetra, G. dan L.J.B. Kreiners, *Sosiologi Umum*, Cet. I; (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. (Cet. VIII; Bandung: PT. al-Maarif, 1999)
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1985)
- Razmal, Abdul Muin. "Konflik Sosial Antara Masyarakat Rongkong dan Baebunta di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara," (Thesis Program Pascasarjana, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2001).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet. V; Jakarta: Alfabeta, 2008)
- Sumartana, Th. et al., ed., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Tenrigau, A. Aziz. dkk, *Baebunta dalam Kerajaan Luwu*, (Palopo, A. Djemma University Press, 2007), h.17
- Pollan, Michael. *The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals*. New York: Penguin, 2006.
- Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. *The War: An Intimate History, 1941–1945*. New York: Knopf, 2007.